



Sentralisasi: Tantangan Sebuah Perpustakaan Seni

Mustofa

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Setiap pimpinan dalam perpustakaan memiliki fungsi untuk menggerakkan orang lain (pustakawan) guna memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dari perpustakaan itu sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, salah satunya perlu menentukan sistem organisasi yang sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga tata kelola dalam sebuah organisasi akan mudah dijalankan dan dikerjakan untuk mencapai tujuan.



Sulistyo-Basuki dalam Arlan (2018:83) mengemukakan definisi perpustakaan perguruan tinggi sebagai perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi dan merupakan unit yang membantu perguruan tinggi yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya. Karenanya, perpustakaan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, fakultas, jurusan, lembaga lain yang berada di bawah naungan perguruan tinggi termasuk ke dalam kategori perpustakaan perguruan tinggi. Dalam definisi tersebut, Sulistyo-Basuki menunjukkan bahwa pada tahun 1990-an perguruan tinggi di Indonesia banyak yang menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjukkan dengan mengakomodasi keberadaan perpustakaan fakultas, jurusan, dan lembaga lain yang berada di bawah perguruan tinggi sebagai perpustakaan perguruan tinggi.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama-tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran lembaga tertinggi dan pimpinan unit akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses kebijakan yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat pengguna (pemustaka).

Wacana sentralisasi dan desentralisasi selalu menarik perhatian dan menjadi bahasan dalam sebuah organisasi. Begitu juga dalam sistem organisasi perpustakaan. Ketika pimpinan tertinggi lembaga mulai mengakomodasi keinginan dari unit-unit untuk memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dalam pengelolaan unitnya, yang disebut sebagai sistem



desentralisasi, maka perubahan administratif besar-besaran akan mengikuti kebijakan tersebut.

Sentralisasi vs Desentralisasi

Jenis perpustakaan tinggi seni saat ini masih belum ada keseragaman tata kelola PT Seni yang satu dengan PT Seni yang lain. Perpustakaan Perguruan Tinggi Seni utamanya, ada PT Seni yang menerapkan perpustakaan tunggal. Artinya, hanya ada satu perpustakaan di PT tersebut dan sudah tidak ada perpustakaan fakultas/jurusan/prodi lagi. Namun, masih terlalu banyak PT Seni di negeri ini, dengan alasan masing-masing, masih mempertahankan adanya perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, perpustakaan jurusan/program studi dan perpustakaan unit kerja. Pola yang kedua ini tidaklah salah, sepanjang ada aturan jelas yang menghendaki seperti ini, adanya integrasi sistem informasi, dan adanya pembagian kewenangan antar perpustakaan tersebut. Pembagian kewenangan tersebut akan tampak jelas dalam pola pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi.

a. Pendekatan Dengan Pola Sentralisasi/ *Centralized Organization*.

Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh keputusan, kebijakan dan wewenang ada pada perpustakaan pusat. Kelebihan pola ini adalah adanya keseragaman pelaksanaan di antara perpustakaan yang ada dan perpustakaan pusat dapat terlepas dari permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah kurang fleksibel terhadap keperluan di perpustakaan fakultas/jurusan/



program studi/unit kerja yang masing- masing memiliki karakter komunikasi dan kebutuhan yang berbeda.

b. Pendekatan Dengan Pola Desentralisasi/*Decentralized Organization*.

Dalam pola desentralisasi ini pendelegasian seluruh/ sebagian besar wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan diserahkan kepada pengelola perpustakaan fakultas/jurusan/program studi/unit kerja. Diharapkan penerapan pola desentralisasi akan dapat memperbaiki dan meningkatkan efektifitas dan produktifitas perpustakaan fakultas/jurusan/ program studi/unit kerja tanpa harus ada campurtangan dari perpustakaan pusat. Pola ini lebih fleksibel, lebih memberdayakan perpustakaan fakultas/jurusan/program studi/unit kerja. Kelemahan dari pola desentralisasi ini adalah dapat menimbulkan euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan kalangan/ kelompoknya sendiri. Di samping itu, perpustakaan pusat akan sulit mengontrol perpustakaan fakultas/jurusan/ program studi/unit kerja.

c. Pendekatan Dengan Perpaduan Antara Pola Sentralisasi dan Pola Desentralisasi

Dalam pola perpaduan ini, keputusan dan kebijakan yang menyangkut seluruh pengguna perpustakaan berada pada perpustakaan pusat. Sedangkan perpustakaan fakultas/ jurusan/program studi/ unit kerja tetap mendapat porsi untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan lingkup perpustakaan fakultas/ jurusan/ program studi/unit kerja.



Lebih lanjut, Eva Rabita (2005) memerinci tentang sentralisasi dan desentralisasi perpustakaan. Menurutnya, pihak yang mendukung konsep sentralisasi perpustakaan perguruan tinggi mengemukakan alasan mereka. Adapun alasan yang dikemukakan untuk mendukung konsep sentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan dokumen (mencakup kegiatan pengadaan, pengkatalogan, dan pengklasifikasian) sebaiknya dipusatkan untuk menghemat biaya, terdapat standar yang seragam bagi seluruh perpustakaan, serta keseragaman praktik kepastakawanan akan tercapai. Seandainya terdapat ketidakseragaman dalam hal pengkatalogan dan pengklasifikasian, seorang pemakai tidak akan mengalami banyak hambatan dalam menggunakan koleksi pada sistem sentralisasi.
- b. Memerlukan lebih sedikit personil.
- c. Memerlukan perlengkapan lebih sedikit.
- d. Lebih mudah mengadakan cantuman sentral atas majalah dan katalog sentral.
- e. Dapat menghindari duplikasi sarana untuk keperluan pemilihan buku, jasa referens, pengkatalogan, dan klasifikasi. Padahal sarana bibliografis semacam itu amat mahal. Juga duplikasi buku dapat diatasi.
- f. Memungkinkan pengembangan kebijakan peminjaman yang seragam. Sistem desentralisasi akan menimbulkan kebijakan peminjaman yang berlainan. Mungkin juga terjadi jam buka yang berbeda, yang akan menimbulkan ketidaksenangan bagi pemakai.



Sebaliknya, pihak yang mendukung gagasan desentralisasi perpustakaan mengajukan argument yang mendukung pendapat mereka. Bila perpustakaan pusat akan sulit mengontrol perpustakaan fakultas/jurusan/program studi/unit kerja.

Perpustakaan ISI Surakarta lebih cocok menggunakan sistem tata kelola sentralisasi, di bawah ini setidaknya ada tiga alasan berdasarkan analisis penulis:

1. Analisis Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki Perpustakaan ISI Surakarta sekarang mengalami penurunan jumlahnya. Pada tahun 2010 pustakawan masih berjumlah 17 orang, sekarang hanya berjumlah 12 orang saja. Belum lagi, dua tahun yang akan datang akan ada beberapa pustakawan yang purna tugas. Sumber daya manusia akan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan selama kurun waktu 10 tahun terakhir perpustakaan tidak ada penambahan pustakawan. Sedangkan purna tugas pustakawan karena batasan umur tidak bisa dihindari.

Melihat realita yang ada di depan mata, jika pimpinan atau pemangku kebijakan tidak melakukan evaluasi terhadap tata kelola organisasi, maka perpustakaan akan jalan di tempat, tidak bisa berkembang dengan baik. Hal itu terjadi karena apa? Karena banyak pos-pos pelayanan yang tidak ada pustakawannya dan sudah ditinggalkan oleh personilnya. Sistem tata kelola organisasi desentralisasi hanya pemborosan penempatan sumber daya manusia. Sedangkan beban pekerjaan pustakawan justru terkesan berat, dimulai dari A – Z. Konsentrasi pustakawan juga terbelah mengingat yang



dilakukan tidak hanya fokus terhadap pelayanan tetapi juga melakukan pekerjaan pengadaan bahkan pengolahan.

2. Analisis Sumber Dana

Jer basuki mawa beya, yang artinya “segala keberhasilan memerlukan biaya” ungkapan ini sangat cocok jika diilustrasikan agar perpustakaan semakin maju. Membangun perpustakaan yang maju, yang modern, yang kekinian sesuai dengan keinginan generasi milenial butuh dana yang banyak. Sumber daya manusia yang cerdas dan berpengalaman saja tidak cukup. Berbeda dengan zaman dahulu yaitu zaman *Bandung Bondowoso*, yang mana perubahan bisa dilakukan oleh bantuan makhluk ghaib dan hanya sehari sudah bisa berubah. Abad XXI adalah Era digitalisasi dan teknologi informasi. Segalanya perlu direncanakan dan dibeli dengan uang.

3. Analisis Koleksi

Salah satu unsur pokok perpustakaan adalah koleksi, karena pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak didukung oleh adanya koleksi yang memadai. Koleksi bahan pustaka haruslah relevan dengan kebutuhan pemustaka atau yang dilayani oleh perpustakaan. Sebuah perpustakaan yang menggunakan sistem sentralisasi akan terhindar dari duplikasi koleksi yang berlebihan karena menerapkan pengadaan koleksi secara terpusat. Data koleksi yang sudah dimiliki dapat dengan mudah terdeteksi. Dengan meminimalisir duplikasi maka akan menghemat anggaran. Anggaran tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk membeli judul koleksi yang lain.



4. Analisis Gedung

Perpustakaan ISI Surakarta dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah melakukan perpindahan sebanyak satu kali. Perpindahan itu didasarkan gedung lama dialihfungsikan menjadi tempat belajar-mengajar. Masalah baru kemudian muncul lagi dimana gedung yang dipakai perpustakaan saat ini juga akan dialihfungsikan untuk proses belajar-mengajar jurusan tertentu. Perpustakaan yang berada di jurusan juga butuh perhatian para pimpinan. Mengingat bahwa perpustakaan jurusan masih terkesan “menumpang” saja. Ketidakpastian keberadaan gedung perpustakaan sudah selayaknya diperhatikan oleh semua pihak. Masalah perpindahan bukan hanya memindah barang mati saja, tetapi juga memindah orang-orang yang di dalamnya. Dan tidak kalah penting untuk membangun sistem otomasi perpustakaan perlu waktu yang tidak sebentar.

Dengan sistem sentralisasi perpustakaan diharapkan semua menjadi jelas, jelas tata kelolanya, jelas SDMnya, jelas sumber dananya dan jelas gedungnya. Dengan demikian Perpustakaan ISI Surakarta akan mudah ditata dan bisa bersaing dengan perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya.

Daftar Pustaka :

Arlan. (2018). Sentralisasi dan Desentralisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi: Tantangan dan Peluang Untuk Perubahan Dan Inovasi”, *Jurnal Al Maktabah* Vol. 3, No. 2, Desember 2018.



Profil Penulis

Mustofa; Pustakawan Muda di Institut Seni Indonesia Surakarta. Lahir di Bantul pada hari Senin Pahing, 6 April 1980. Saat ini tinggal di Kertonatan RT. 04 RW. 2 Kartosuro Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahun 1996 masuk di SMU Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan lulus tahun 1999. Pada tahun 2000-2003 kuliah di IAIN Sunan Kalijaga jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Tahun 2008 kemudian transfer S1 Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, UIN Sunan Kalijaga lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2014 melanjutkan kuliah di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, minat kajian “Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi” dan lulus pada tahun 2017. Hp. 087736316182. Email: mmustofa81@gmail.com

